

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu masalah besar yang terdapat di negara Indonesia yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Terdapatnya kemiskinan diberbagai daerah tentunya menjadi tugas pemerintah dalam memberantas permasalahan tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas permasalahan ini namun, dampak dari upaya tersebut tidak terlalu berpengaruh dalam memberantas kemiskinan yang ada. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia berdasarkan data pada bulan Maret tahun 2023 sebanyak 25,90 juta orang atau sebanyak 9,36%.

Terdapatnya masalah kemiskinan di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia belum menjadi negara dengan kehidupan penduduknya yang mencapai tingkat kesejahteraan. Hal ini dikarenakan tingkat kemiskinan yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi dan begitu seterusnya. Kemiskinan terjadi disebabkan oleh berbagai faktor seperti, minimnya lapangan kerja, rendahnya sumber daya manusia, biaya hidup disuatu daerah yang tinggi, pendidikan yang rendah, dan terdapatnya lingkaran setan kemiskinan didalam suatu keluarga. Faktor – faktor tersebut yang menyebabkan kemiskinan susah untuk diberantas.

Menurut Sunyoto (2010), konsep kemiskinan terbagi atas tiga yaitu, kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan subyektif. Kemiskinan absolut menjelaskan batas kemiskinan karena memiliki ukuran tertentu yang kongkret. Subyektif berasumsi bahwa kemiskinan disuatu daerah yang berbeda dengan



daerah lainnya dan kemiskinan di waktu tertentu berbeda dengan waktu lainnya. Konsep ini diukur berdasarkan pertimbangan masyarakat dengan berorientasi pada kekayaan hidup. Sedangkan kemiskinan subyektif berdasarkan atas kelompok kemiskinan itu sendiri karena konsep ini tidak memperhitungkan.

Menurut Todaro (2008), kemiskinan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan kondisi dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kondisi dimana masyarakat memiliki pendapatan yang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar tetapi lebih rendah dibanding dengan pendapatan nasional.

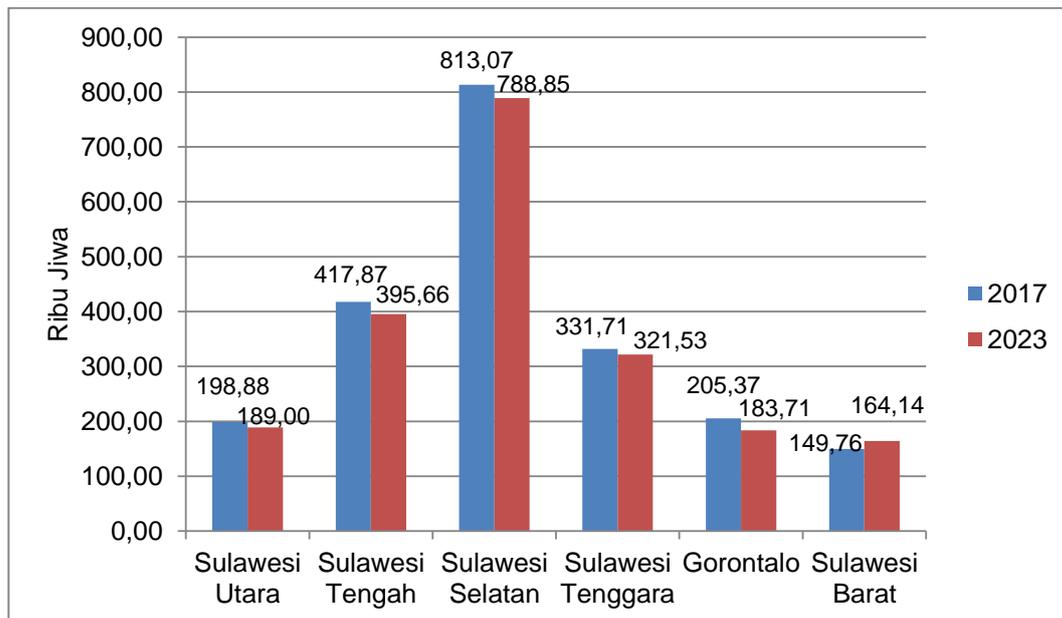
Kemiskinan menjadi masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan menjadi fokus utama di berbagai negara salah satunya Indonesia. Hal tersebut menjadi dasar dalam pencapaian berbagai tujuan pembangunan lainnya seperti pariwisata, infrastruktur, dan lainnya. Dalam RPJMN 2020 hingga 2024 strategi pengurangan tingkat kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Dalam RPJMN 2020 hingga 2024 telah ditetapkan target pembangunan secara makro untuk mengurangi tingkat kemiskinan yaitu sebesar 6 hingga 7% pada akhir tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, 2021).

Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pendapatan lebih rendah dibanding pendapatan nasional namun masih bisa mengakses layanan sosial. Jika jumlah penduduk disuatu wilayah meningkat tanpa diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang luas maka akan menurunnya kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut sehingga peningkatan kemiskinan. Penduduk dapat diketahui tergolong miskin jika pangan dan nonmakanan diukur berdasarkan garis kemiskinan. Adapun



garis kemiskinan nasional sebesar Rp15.750 per orang per hari dan Rp472.525 per orang per bulan.

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan masalah tingkat kemiskinan tertinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi lainnya selama tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2023, garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai Rp436.025 per kapita per bulan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Pulau Sulawesi tahun 2017 – 2023

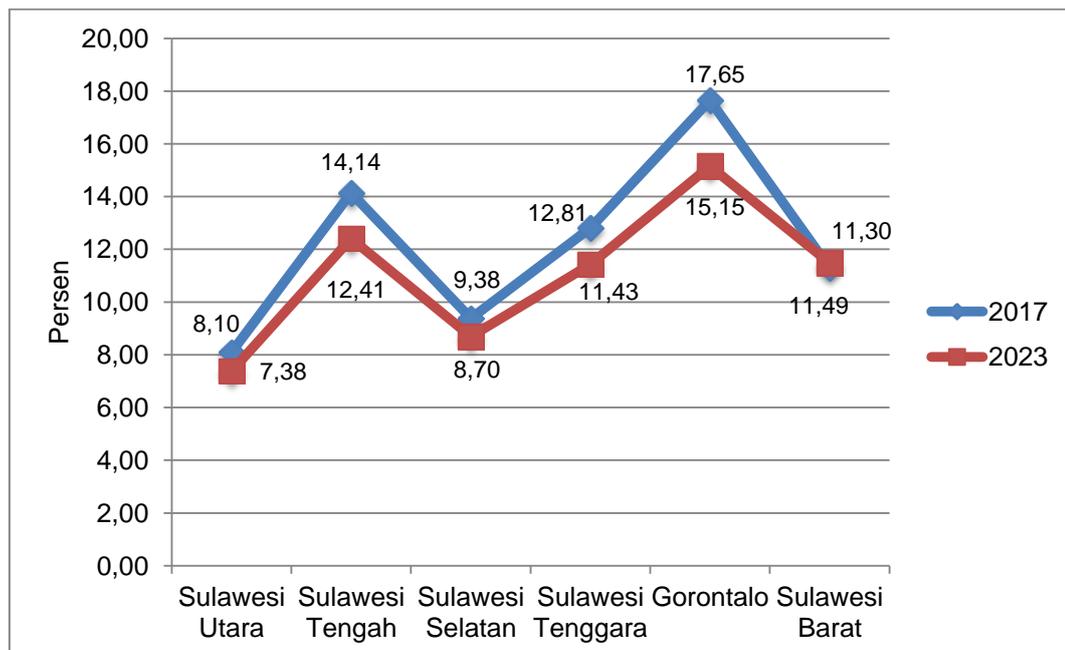
Gambar di atas menunjukkan perbandingan jumlah penduduk mulai tahun 2017 hingga 2023 di Pulau Sulawesi. Berdasarkan data yang ada, Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi selama tujuh tahun terakhir, dimana pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan sebesar 813,07 ribu jiwa kemudian terus berfluktuasi hingga di tahun 2023 mencapai angka 788,85 ribu jiwa. Meskipun Sulawesi Selatan terus mengalami penurunan namun, hal ini



n provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi dibandingkan dengan provinsi Sulawesi lainnya. Adapun provinsi dengan

jumlah penduduk miskin terendah yaitu provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah penduduk di tahun 2017 sebesar 149,76 ribu jiwa dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 164,14 ribu jiwa.

Dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan mengalami kenaikan pada tahun 2023 dimana, pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin mencapai angka 777,44 ribu jiwa lalu meningkat menjadi 788,85 ribu jiwa. Secara umum, tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami fluktuasi selama tahun 2017 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 hingga 2021 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yang awalnya berjumlah 767,80 ribu jiwa di tahun 2019 lalu meningkat hingga 784,98 ribu jiwa di tahun 2021.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Gambar 1.2 Persentase Penduduk Miskin Pulau Sulawesi Tahun 2017 - 2023

Berdasarkan data di atas, Provinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat kedua penduduk miskin terendah setelah Provinsi Sulawesi Utara. Jika dengan jumlah penduduk miskin, persentase kemiskinan menunjukkan beberapa tahun terakhir, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah



penduduk miskin yang menunjukkan angka tinggi disetiap tahunnya. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan mencapai 9,38% dan terus berfluktuasi hingga mencapai angka 8,70% di tahun 2023. Pada tahun 2019 hingga tahun 2021 persentase penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dimana, pada tahun 2019 mencapai 8,69% lalu meningkat hingga angka 8,78% pada tahun 2021, kemudian menurun di tahun 2022 namun kembali meningkat di tahun 2023.

Dengan demikian, meskipun persentase kemiskinan menunjukkan tren penurunan tetapi, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan tetap menunjukkan angka yang tinggi dibanding dengan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi lainnya. Hal ini menandakan masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Walaupun persentase kemiskinan menunjukkan hasil yang baik namun tantangan tetap ada sehingga diperlukan berbagai upaya dalam pengentasan kemiskinan sehingga tiap tahunnya terus menunjukkan hasil yang baik.

Setelah mengetahui kondisi tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama tujuh tahun terakhir, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan lima prinsip dalam menanggulangi kemiskinan, diantaranya, tepat sasaran yaitu, program penanggulangan kemiskinan menggunakan data penduduk miskin yang akurat dan terkini; Koordinasi dan kerjasama oleh pemangku kepentingan baik dari pemerintah pusat, daerah, universitas, dan pihak non pemerintah lainnya; Pendekatan multidimensi yaitu, tetap memperhatikan kesetaraan gender, inklusi sosial, dan pembangunan berkelanjutan; Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan menggunakan indikator yang terukur; Penduduk miskin menerima program perlindungan sosial dan rdayaan sehingga penduduk yang tergolong miskin dapat keluar dari ran; Mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan ntuk masyarakat miskin.



Lebih lanjut, adapun strategi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin yaitu:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat

Strategi ini diselenggarakan melalui pemberian program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan program lainnya yang dianggap dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

2. Peningkatan pendapatan masyarakat

Strategi ini dilakukan melalui peningkatan produktivitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas UMKM, dan peningkatan akses pembiayaan UMKM.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan

Strategi ini dilakukan melalui kebijakan dalam rangka perbaikan dan efisiensi pemerintahan yang mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas kebijakan.

Adapun faktor penghambat dalam pencapaian target penurunan kemiskinan yaitu, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran mempengaruhi kondisi kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, kurangnya akses layanan keuangan dan modal dalam membuka usaha kecil, akses pendidikan dan peningkatan keterampilan dan kualifikasi tidak merata, serta ketergantungan pada sektor tertentu seperti pertanian.

Untuk mengatasi segala faktor penghambat tersebut, diperlukan upaya dan inovasi agar kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan menurun. Dengan adanya lima prinsip dan strategi dalam penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat menjadi acuan



am melakukan pengentasan kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi

1

Berdasarkan hasil kajian di atas maka tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya menurun dan tergolong tinggi jika dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Lainnya. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian mengenai **“Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 – 2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan?
2. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan?
3. Apakah Indeks Pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan?
4. Apakah Indeks Kesehatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan?
5. Apakah Rasio Gini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan
3. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pendidikan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan



Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

4. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Kesehatan terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan
5. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Gini terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini yaitu:

1. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kemiskinan, sehingga masyarakat dapat mengetahui cara untuk mengatasi dan mencegah timbulnya kemiskinan.
2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu:

1. Dengan adanya penelitian ini, dapat mendorong kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
2. Dengan adanya penelitian ini, dapat diketahui Kabupaten/Kota yang paling membutuhkan bantuan sehingga pengalokasian sumber daya lebih efisien.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Kemiskinan

Menurut Mankiw *et al.* (2012), kemiskinan adalah kondisi dimana pendapatan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditentukan oleh pemerintah dan disesuaikan sekitar setiap tahun untuk menjelaskan perubahan pada tingkat harga dan tergantung pada ukuran keluarga. Tingkat kemiskinan merupakan persentase pada populasi dengan pendapatan keluarga berada pada tingkat absolut.

Menurut Khandker dan Haughton (2009), Kemiskinan adalah kondisi kekurangan dalam kesejahteraan. Terdapat tiga cara atau pendekatan dalam mengukur kesejahteraan yaitu pertama, terdapat sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan pendapatan atau konsumsi individu dengan beberapa batas standar yang ditentukan. Kedua, akses seseorang dalam mengkonsumsi barang tertentu seperti, makanan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Ketiga, kemampuan untuk memberikan dampak bagi kehidupan sekitar.

Menurut Dowling & Valenzuela (2010), masyarakat menjadi miskin karena rendahnya modal manusia, seperti pendidikan, pelatihan, pengembangan, dan modal fisik dengan jumlah yang kecil. Jika mereka memiliki modal manusia dan fisik yang baik,

memiliki kesempatan bekerja karena adanya diskriminasi.



Salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan, dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Selain itu, kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan. umumnya, mereka yang tergolong miskin tidak memiliki pekerjaan serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka juga tidak memadai (World Bank, 2004).

Menurut Arsyad (2010), kemiskinan dapat terjadi karena anggota masyarakat tidak atau belum berpartisipasi dalam proses perubahan disebabkan ketidakmampuan dalam kepemilikan faktor produksi dan kualitas yang tidak memadai. Menurut Rohma, dkk (2024), kemiskinan muncul karena adanya ketimpangan distribusi pendapatan, adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan perbedaan pada tingkat upah, serta perbedaan dalam pemenuhan modal.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kemiskinan "*Understanding the Determinants of Poverty*". Teori ini dikemukakan oleh Jonathan Houghton dan Shahidur R. Khandker. Teori ini membahas tentang tiga karakteristik yang berkaitan dengan faktor penentu kemiskinan. Tiga karakteristik yang dimaksud yaitu karakteristik wilayah, karakteristik masyarakat, dan karakteristik rumah tangga dan individu. Karakteristik wilayah mencakup kondisi lingkungan dan bencana alam, karakteristik masyarakat mencakup infrastruktur, pelayanan seperti pendidikan dan kesehatan. Serta karakteristik individu yang mencakup status pekerjaan, status kesehatan, dan pendidikan.

Selanjutnya, Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) yang



menurut Nurkse (1953), bahwa "a poor country is poor because it is poor" (sebuah negara miskin karena memang miskin). Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan berdasarkan teori ini yaitu, pertama, kemiskinan muncul karena adanya

ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang. Kedua, kemiskinan terjadi akibat perbedaan kualitas SDM, jika kualitas SDM rendah maka produksi juga akan rendah sehingga pendapatan juga ikut menurun. Rendahnya SDM disebabkan rendahnya pendidikan, terdapat diskriminasi, keturunan, dan lainnya. Ketiga, kemiskinan terjadi akibat perbedaan akses ke modal. Selain itu, ada juga teori Perangkap Kemiskinan (*Deprivation Trap*) yang dikemukakan oleh Robert Chambers (1997). Robert Chambers menyebutkan lima unsur perangkap kemiskinan yaitu, kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan atau kadar isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Tambunan (2001), pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Perekonomian dikatakan mengalami peningkatan jika pendapatan riil masyarakat lebih besar dibandingkan pendapatan riil masyarakat ditahun sebelumnya. Dalam ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berarti peningkatan pendapatan nasional.

Menurut Kuznets dalam Jhingan (2012), pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai suatu kenaikan pada jangka panjang pada kemampuan suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barang ekonomi kepada penduduknya. Sementara itu, Kindleberger (2012), pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai produksi output lebih banyak pada suatu negara disertai dengan perubahan dalam pengaturan teknis dan kelembagaan dimana output tersebut diproduksi dan didistribusikan. Lebih lanjut, menurut Sukirno (2011),



onomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.

2.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka

Menurut World Bank, pengangguran merupakan bagian angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi tersedia untuk dan mencari pekerjaan. Sadono (2003), pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam golongan angkatan kerja ingin bekerja tetapi belum memperoleh pekerjaan tersebut. Orang yang dipekerjakan adalah yang berusia 15 tahun atau lebih yang telah bekerja baik untuk mendapatkan bayaran, tidak bekerja dengan alasan ketidakhadiran seperti liburan, cuti, sakit, dan lainnya, dan bekerja dengan waktu atau jangka tertentu (Organisasi Perburuhan Internasional).

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004), pengangguran merupakan orang – orang yang tidak bekerja namun masih berusaha untuk mencari suatu pekerjaan atau sedang menunggu kesempatan kerja. Pengangguran dibedakan atas tiga jenis berdasarkan keadaannya yaitu pengangguran friksional, pengangguran struktural, dan pengangguran konjungtur. Selain itu, pengangguran berdasarkan cirinya yaitu, pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan setengah menganggur (Sadono Sukirno, 2000).

Terdapat tiga teori tentang pengangguran yaitu, Teori Klasik, dimana teori ini menjelaskan bahwa pengangguran dapat dicegah dengan memastikan adanya permintaan untuk menyerap pasokan melalui sisi penawaran dan mekanisme penetapan harga pasar bebas. Jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja, upah akan turun sehingga produksi perusahaan akan menurun. Dengan demikian, permintaan akan tenaga kerja terus meningkat karena perusahaan melakukan perluasan produksi karena

jan yang diperoleh dari rendahnya biaya.



Teori Keynes, teori ini berlawanan dengan teori klasik. Teori Keynes menjelaskan masalah pengangguran yang terjadi akibat permintaan agregat yang rendah sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat karena rendahnya konsumsi. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun sehingga berdampak pada daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa dan mengakibatkan kerugian pada produsen. Menurut Keynes, diperlukan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat membuka lapangan pekerjaan.

Teori Pengangguran dalam Pasar Tenaga Kerja, membahas tentang labor supply dan demand supply dimana, keseimbangan pasar tenaga kerja mencerminkan adanya kesesuaian antara penawaran tenaga kerja (*labor supply*) dan permintaan tenaga kerja (*labor demand*). Pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh angkatan kerja, inflasi, migrasi, tingkat upah, pertumbuhan ekonomi, dan lainnya.

2.1.4 Indeks Pendidikan

Pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Soekidjo Notoatmodjo, 2003). Pendidikan adalah keseluruhan proses, teknik, dan metode belajar mengajar dalam rangka mengalihkan sesuatu ilmu yang telah ditetapkan sebelumnya (S.P. Siagian, 1986).

Pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mengubah tabiat (behavior) manusia (Frederick J. Mc. Donald). Menurut Amartya Sen dalam Bloom dan Canning (2001), seseorang dapat dikatakan miskin bila mengalami "*Capability Deprivation*" dimana seseorang mengalami kekurangan kebebasan substantif. unya sangat penting dalam kehidupan seseorang. Dengan adanya ka kesejahteraan hidup diharapkan dapat terus meningkat karena



semakin tinggi pendidikan seseorang maka diyakini seseorang tersebut akan jauh dari kesenjangan sosial.

Menurut Todaro (2008), karakter sosial dan ekonomi dapat dipengaruhi oleh struktur pendidikan yang dianut oleh negara. Sedangkan menurut Sanz *et. Al* (2017), jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Adanya kesenjangan dibidang pendidikan akan memberikan dampak langsung pada kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang tinggi. Pendidikan merupakan *human capital*, semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan seseorang maka akan meningkatkan kemampuan konsumsi mereka, sehingga dapat mengangkat kehidupan mereka dari kemiskinan (Wahyudi dkk. 2013).

Menurut Solihin (2018), keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar, karena pendidikan memberi kemampuan untuk berkembang lewat ilmu pengetahuan yang dimiliki, pendidikan juga menambah kesadaran untuk hidup layak dan bermatabat. Pendidikan juga merupakan investasi untuk masa depan dalam bentuk penambahan hasil kerja yang akan mempengaruhi produktifitas kerja sehingga akan mengurangi jumlah penduduk miskin.

2.1.5 Indeks Kesehatan

Menurut Widodo *et al.* (2012), kesehatan merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Kesehatan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Adapun indikator yang menjadi pengukur dalam kesehatan masyarakat yaitu indikator kesehatan lingkungan.



Putra dan Rianto (2016), sumber air yang bersih berkaitan erat dengan an masyarakat. Air merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting

dalam kehidupan masyarakat, jika air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi maka akan menimbulkan berbagai penyakit sehingga kesehatan masyarakat menurun.

Menurut World Health Organization (2020), kesehatan lingkungan terdiri dari akses sanitasi yang layak, akses air bersih, dan layanan kebersihan berperan penting bagi kesehatan masyarakat dan ekonomi negara termasuk di Indonesia. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kerusakan lingkungan yaitu air dan sanitasi yang tidak layak, serta polusi udara. Dengan adanya lingkungan tercemar atau tidak sehat tentunya akan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat yang berada dilingkungan tersebut.

Menurut Masdar Mas'ud (2020) dalam undang – undang No.36 Tahun 2009, definisi kesehatan yaitu keadaan yang sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup dengan produktif baik secara sosial maupun ekonomis. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator dalam mengukur tingkat kesehatan.

2.1.6 Rasio Gini

Rasio Gini merupakan indikator dalam mengukur ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dasar dari Rasio Gini yaitu kurva *Lorenz*. Kurva *Lorenz* merupakan kurva yang menjelaskan perbandingan distribusi variabel dengan distribusi seragam yang menggambarkan persentase kumulatif penduduk. Nilai rasio gini semakin kecil jika kurva dengan garis diagonal (garis pemerataan dalam distribusi pendapatan) semakin dekat. Sebaliknya, jika kurva semakin jauh dengan garis diagonal maka nilai rasio gini semakin besar (BPS, 2022). Lebih lanjut, kurva *Lorenz* menggambarkan distribusi pendapatan penduduk, namun tidak dapat membandingkan nilai kuantitatif. Oleh karena itu, rasio gini



digunakan untuk mengukur perbandingan tinggi atau rendahnya ketimpangan distribusi pendapatan penduduk secara kuantitatif (Eddy Kiswanto dkk, 2019).

Menurut Todaro dan Smith (2006), Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan secara menyeluruh dengan nilai nol hingga satu. Semakin mendekati nol maka distribusi pendapatan semakin mendekati pemerataan sempurna. Sebaliknya, jika mendekati satu maka tingkat ketimpangan pendapatan mendekati ketimpangan sempurna. Negara dengan distribusi pendapatan merata maka angka rasio gini berkisar di angka 0,20 hingga 0,35 sedangkan negara dengan ketimpangan yang tinggi memiliki angka rasio gini yang berkisar di angka 0,50 hingga 0,70.

Ketimpangan fokus pada distribusi kepada kepemilikan seperti pendapatan atau konsumsi diantara seluruh masyarakat. Dalam konteks analisis kemiskinan, ketimpangan berdasarkan pada pengukuran keyakinan bahwa kesejahteraan individu bergantung pada posisi relatif ekonomi mereka terhadap orang lain yang berada pada kelompok masyarakat yang sama (Haughton dan Khandker, 2009).

Dampak positif dari ketimpangan yaitu, dapat mendorong wilayah yang kurang maju dan berkembang untuk bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya untuk meningkatkan kesejahteraannya sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yaitu inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas serta ketimpangan yang tinggi dipandang tidak adil untuk kesejahteraan masyarakat (Todaro, 2004).

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan kegiatan yang menunjukkan adanya perkembangan perekonomian yang terjadi disuatu negara. Menurut teori Sukirno, ekonomi menyebabkan peningkatan barang dan jasa yang dihasilkan yang akan membuat kehidupan masyarakat tersebut sejahtera. Akan tetapi, efek pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung menekan tingkat kemiskinan dengan



signifikan.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan ketimpangan dan kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pembangunan ekonomi. Masyarakat dengan kondisi ekonomi yang terbatas tentunya akan terbatas juga dalam mengakses fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, teknologi, dan fasilitas lainnya. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka kemiskinan akan menurun, tetapi tidak menutup kemungkinan juga jika pertumbuhan ekonomi meningkat namun kemiskinan tidak mengalami penurunan. Hal ini biasanya dipicu oleh beberapa faktor sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu.

2.2.2 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan

Pengangguran merupakan salah satu masalah besar yang menyebabkan kemiskinan terus menerus meningkat sehingga kemiskinan pun tercipta. Pengangguran disebabkan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan kerja sehingga terdapat kesenjangan antara *demand* dan *supply* akan tenaga kerja. Selain itu, pengangguran juga bisa terjadi karena kurang terbukanya lapangan pekerjaan, skill atau kemampuan seseorang yang tidak memenuhi syarat kerja, kurangnya informasi, dan pendidikan yang tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan, lembaga, atau sebagainya.

Pengangguran dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena semakin meningkatnya jumlah penduduk disuatu negara tentunya terjadi peningkatan juga pada kalangan pencari kerja. Adapun upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran yaitu dengan memperluas lapangan kerja namun, sebagian lapangan kerja tersebut memiliki ketentuan khusus yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh para pencari kerja.



kerja dan tidak semua ketentuan tersebut dimiliki oleh para pencari kerja. Hal inilah yang juga menjadi penghambat seseorang semakin susah dalam mendapatkan pekerjaan. Salah satu dampak negatif dari adanya pengangguran yaitu meningkatnya tingkat kriminalitas disuatu daerah karena faktor ekonomi yang memaksa seseorang harus melakukan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.2.3 Hubungan Indeks Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan

Hubungan pendidikan dan kemiskinan merupakan masalah yang terjadi di beberapa negara baik di negara maju maupun negara berkembang. Beberapa negara beranggapan bahwa kualitas pendidikan mampu memberantas kemiskinan. Pendidikan yang berkualitas dianggap dapat memberikan masa depan yang baik bagi seseorang sehingga tingkat kemiskinan dapat berkurang.

Pendidikan merupakan peran penting dalam meningkatkan taraf hidup seseorang karena semakin tinggi pendidikan yang dijangkau maka seseorang tersebut semakin mampu dalam mencapai kesejahteraan hidupnya. Dengan pendidikan, pengetahuan seseorang semakin bertambah sehingga menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan pengetahuan yang didapat pun bermanfaat di dunia kerja. Berikut pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan yaitu, dengan adanya pendidikan, keterampilan dan pengetahuan seseorang akan meningkat sehingga hal ini menjadi peluang yang cukup besar bagi seseorang dalam memasuki dunia kerja. Dengan adanya pendidikan, dapat memberantas kemiskinan. Dalam hal ini, seseorang yang berpendidikan tinggi berpeluang besar dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan pendapatan yang diperoleh pun semakin tinggi hingga mampu memenuhi
nyanya. Dengan demikian, pendidikan membawa dampak positif dalam
orang dan kemiskinan akan semakin berkurang sehingga tujuan dalam
konomi dapat tercapai.



2.2.4 Hubungan Indeks Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan

Kesehatan merupakan kondisi dimana seseorang yang terbebas dari penyakit. Dengan memiliki tubuh yang sehat tentunya akan berpengaruh terhadap produktivitas seseorang. Namun, tidak semua individu memiliki tubuh yang sehat karena terdapat beberapa faktor salah satunya akses kesehatan yang sulit dijangkau, hal ini biasanya dialami oleh masyarakat yang kurang mampu. Rendahnya kesehatan yang dialami seseorang menyebabkan seseorang tersebut tidak mampu dalam bekerja keras sehingga kondisi perekonomian pun tidak dapat menjangkau fasilitas kesehatan yang telah disediakan.

Masalah kemiskinan menjadi masalah serius yang terdapat disuatu negara. Kemiskinan membawa berbagai dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat salah satunya tingkat kesehatan yang rendah. Semakin rendah tingkat kesehatan maka kesempatan masyarakat untuk terbebas dari lingkaran kemiskinan juga semakin kecil karena produktivitas yang semakin menurun, kesempatan dalam mendapatkan pendidikan jenjang tinggi semakin kecil, dan persaingan tenaga kerja yang semakin lemah sehingga kemiskinan semakin susah untuk ditekan dan pengangguran terus meningkat.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mencegah terjadinya kemiskinan seperti, adanya program-program yang bertujuan dapat menekan angka kemiskinan namun, kemiskinan masih terus berlanjut bahkan semakin meningkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, semakin rendahnya tingkat kesehatan maka angka kemiskinan akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika tingkat kesehatan

angka kemiskinan akan berkurang.



2.2.5 Hubungan Rasio Gini terhadap Tingkat Kemiskinan

Rasio gini merupakan ukuran ketimpangan yang paling sering digunakan dalam mengukur ketimpangan disuatu wilayah dengan nilai yang berkisar dari nol sampai satu, dimana nol menandakan tidak ada ketimpangan sedangkan satu menandakan ketimpangan sempurna. Ketimpangan dapat terjadi diberbagai aspek kehidupan ekonomi seperti, pendapatan individu, akses pekerjaan yang layak, akses terhadap pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, dan lainnya. Terjadinya kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan mengakibatkan sebagian kecil penduduk menguasai sebagian besar kekayaan sedangkan sebagian lainnya hidup dalam kemiskinan. Hal ini menimbulkan kesenjangan yang cukup signifikan antara kelompok kaya dan kelompok miskin.

Terjadinya ketimpangan pendapatan tentunya akan menurunkan daya beli masyarakat atas barang dan jasa. Jika daya beli masyarakat menurun maka, aktivitas ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa juga akan terhambat sehingga hal ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tentunya akan menurun. Terbatasnya barang dan jasa yang dihasilkan berdampak pada pendapatan yang diterima masyarakat serta lapangan kerja yang diciptakan juga terbatas. Dengan demikian, lapangan kerja yang terbatas membuat masyarakat sulit dalam memperoleh pendapatan sehingga menimbulkan kemiskinan.

2.3 Tinjauan Empirik

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Rosidatul Halim Najib Putri dan Indah yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran sebagai Mediasi di Probolinggo. Penelitian ini



menggunakan metode penelitian kuantitatif yang berbentuk asosiatif menggunakan satu variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi, satu variabel terikat yaitu tingkat kemiskinan dan satu variabel intervening yaitu tingkat pengangguran. Hasil dari penelitian ini adalah variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan berdasarkan analisis sobel dinyatakan bahwa tingkat pengangguran tidak memediasi, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian terkait hal ini juga telah dilakukan oleh Nizar *et al* (2013). Penulis memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel kemiskinan. Hal ini disebabkan adanya pengurangan kemiskinan dalam bentuk pemakaian teknologi berupa aplikasi terhadap petani, namun kurangnya pengetahuan petani terhadap teknologi sehingga keterlambatan dalam menggunakan teknologi berpengaruh pada berkembangnya produk pertanian sehingga menyebabkan penghasilan petani tidak stabil.

Laga Priseptian & Wiwin Priana Primandhana (2022) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum provinsi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan sedangkan IPM dan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan serta secara simultan seluruh variabel bebas mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur.

Muhammad Hafiz Fadhilah, Masruri Muchtar, dan Pardomuan Robinson Sihombing (2023) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk, tingkat pengangguran,



rasio gini secara simultan mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang
 a. Secara parsial seluruh variabel independen mempengaruhi jumlah

penduduk miskin namun dengan arah pengaruh yang berbeda,. Jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan rasio gini berpengaruh secara positif. Sedangkan variabel pendidikan berpengaruh secara negatif terhadap kemiskinan di Indonesia.

Nurlaila Maysaroh Chairunnisa dan Yuha Nadhirah Qintharah (2022) melakukan penelitian terkait Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 – 2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesehatan tidak berpengaruh pada kemiskinan, pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan dan upah minimum Kota/Kabupaten tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

Ali Fahmi (2014) melakukan penelitian terkait Faktor Pendidikan dan Kesehatan Berpengaruh Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesehatan berpengaruh negatif tapi signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien regresi -163,121 yang artinya semakin meningkat kesehatan maka kemiskinan akan menurun sebesar 163,121.

Darma Endrawati, Syamsu Nujum, dan Abbas Selong (2023) melakukan penelitian terkait Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Indonesia 2017 – 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, rasio gini, dan IPM cenderung membaik namun berkecenderungan pada saat pandemi, saat pandemi hanya tipologi kemiskinan provinsi menurut pertumbuhan ekonomi yang banyak mengalami pergeseran kuadran ke arah pertumbuhan ekonomi rendah. Secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Rasio h positif signifikan dan IPM berpengaruh negatif signifikan. Secara variabel berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.



2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual yang menggambarkan teori yang terkait dengan faktor – faktor dari suatu masalah. Kerangka ini juga memberikan penjelasan mengenai berbagai fenomena yang akan menjadi fokus penelitian. Kerangka ini menjelaskan terkait hubungan variabel X yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan rasio gini terhadap variabel Y yaitu tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kemiskinan, karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka akan tercipta lapangan kerja dan pendapatan per kapita pun meningkat. Salah satu syarat untuk tercapainya pembangunan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, namun selain angka perlu juga diperhatikan siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan jika hanya sebagian orang yang merasakan manfaatnya, namun jika mayoritas masyarakat ikut berpartisipasi dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat dikurangi dan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin dapat diperkecil (Todaro, 2006:231).

Pengangguran merupakan salah satu penyebab meningkatnya kemiskinan. Jika seseorang tidak bekerja maka pendapatan yang dimiliki akan terus berkurang sehingga akan sulit dalam memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan. Pengangguran terjadi karena kurang tersedianya lapangan kerja disertai dengan jumlah penduduk yang semakin banyak disuatu wilayah selain itu, pengangguran tercipta karena rendahnya produktivitas kerja sehingga dapat menurunkan kesejahteraan hidup
gga tingkat kemiskinan semakin meningkat.



Pendidikan berperan penting dalam kehidupan masyarakat dan juga mampu mengurangi kemiskinan. Pendidikan yang berkualitas tentunya memberikan dampak yang baik bagi seseorang dalam dunia kerja. Seseorang dengan pendidikan yang berkualitas tentunya memiliki peluang dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga pendapatan yang dihasilkan pun semakin besar dan sejahtera. Sebaliknya, jika tingkat pendidikan seseorang rendah maka peluang seseorang dalam memasuki dunia kerja semakin kecil karena ilmu dan keahlian yang dimiliki terbatas dan akan sulit bersaing dalam dunia kerja sehingga akan berdampak pada pendapatan dan kemiskinan pun semakin meningkat. Seseorang dikatakan tidak miskin jika pendapatan yang dimiliki berada di atas garis kemiskinan (Seran, 2012).

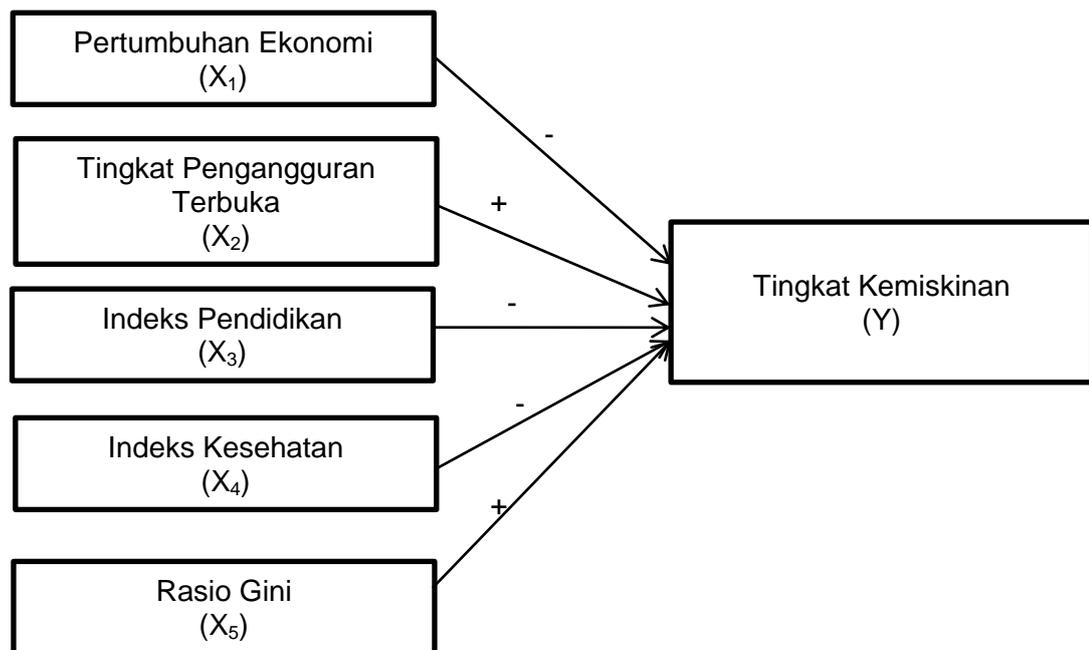
Kesehatan tentunya akan berpengaruh pada produktivitas seseorang. Semakin sehat tubuh seseorang maka produktivitas akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika seseorang tidak merasa sehat tentunya produktivitas akan semakin menurun dan berdampak pada kesejahteraan hidupnya. Dengan demikian, kemiskinan pun semakin meningkat karena lemahnya produktivitas yang tentunya akan berdampak pada perekonomian seseorang.

Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan kemiskinan. Jika ketimpangan pendapatan terus meningkat maka kemiskinan juga akan terus meningkat. Ketidakmerataan pendapatan yang terjadi memberi dampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi dan juga berdampak buruk bagi penduduk miskin seperti, sulit mengakses pendidikan, kesehatan, serta terbatasnya lapangan kerja yang membuat masyarakat semakin sulit dalam meningkatkan taraf hidupnya. Rasio gini merupakan alat yang digunakan dalam mengukur ketimpangan

pendapatan di suatu wilayah.



Penjelasan di atas menggambarkan faktor – faktor yang digunakan dalam penelitian ini. Faktor – faktor tersebut hampir sama dengan faktor yang mempengaruhi kemiskinan pada umumnya akan tetapi, dalam penelitian ini kemiskinan lebih berdampak negatif terhadap kesejahteraan hidup seseorang. Adapun faktor yang dianggap lebih spesifik mempengaruhi kemiskinan yaitu terkait pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut merupakan dua komponen yang sangat berperan penting terhadap tingkat produktivitas seseorang, jika seseorang memiliki pendidikan yang memadai dan kesehatan yang baik maka produktivitas seseorang akan meningkat. Sebaliknya, jika pendidikan kurang memadai dan kesehatan yang dimiliki kurang baik maka produktivitas akan menurun. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

2.5 Pengembangan Hipotesis



merupakan dugaan sementara yang dibuat untuk menjelaskan suatu fenomena, kebenarannya harus diuji terlebih dahulu melalui penelitian. Adapun hasil penelitian yaitu:

1. Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Diduga Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Diduga Indeks Pendidikan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Diduga Indeks Kesehatan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Diduga Rasio Gini berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

